



The Influence of Regional Government Policy Implementation on the Effectiveness of Ketapanrame Trawas Tourism Village Development

Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Efektivitas Pengembangan Desa Wisata Ketapanrame Trawas

Hendra Sukmana*, Ilmi Usrotin Choiriyah, Ahmad Riyadh Umar Balahmar

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia

ABSTRACT

The study was conducted with the aim of determining and analyzing the effect of local government policy implementation on the effectiveness of the development of Ketapanrame Trawas tourist village in Mojokerto Regency. The study was conducted using a quantitative approach with a causal associative research type. The data collection technique was carried out using a questionnaire involving employees of the Tourism Office, village officials, business actors, and tourists. The data were collected and analyzed using simple linear regression. The results of the study concluded that the implementation of policies had a significant effect on the effectiveness of the development of Ketapanrame Tourism Village, Trawas District, Mojokerto Regency. However, the r-square value obtained was still below 50%, indicating that the implementation of these policies was not yet optimal in supporting the development of Ketapanrame Trawas Tourism Village in Mojokerto Regency.

OPEN ACCESS

ISSN 2338-445X (online)
ISSN 2527-9246 (print)

Edited by:

Hasniati

Reviewed by:

Theresia Octastefani and Akbar
Pandu Dwinugraha

*Correspondence:

Hendra Sukmana
hendra.sukmana@umsida.ac.id

Published: 31 Oktober 2025

Citation:

Sukmana, H., Choiriyah, I. U., & Balahmar, A. R. U. (2025).

The Influence of Regional Government Policy Implementation on the Effectiveness of Ketapanrame Trawas Tourism Village Development.

JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik). 13:2.

doi: 10.21070/jkmp.v13i2.1957

ABSTRAK

Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh implementasi kebijakan pemerintah daerah terhadap efektivitas pengembangan desa wisata Ketapanrame Trawas Kabupaten Mojokerto. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif kausal. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan kueisone yang melibatkan pegawai Dinas Pariwisata, perangkat desa, pelaku usaha, dan wisatawan. Data dikumpulkan dan dianalisis menggunakan metode regresi linier sederhana. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengembangan Desa Wisata Ketapanrame, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Namun, nilai r-square yang diperoleh masih berada di bawah 50 persen, yang mengindikasikan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut belum optimal dalam mendukung pengembangan Desa Wisata Ketapanrame Trawas Kabupaten Mojokerto.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pemerintah Daerah, Efektivitas, Pengembangan Desa Wisata

PENDAHULUAN

Pengembangan desa wisata merupakan salah satu strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan ekonomi lokal, mengurangi kesenjangan wilayah, dan memperkuat identitas budaya masyarakat pedesaan. Desa wisata diharapkan dapat menjadi motor penggerak pembangunan berkelanjutan, karena mampu mengintegrasikan potensi alam, budaya, dan aktivitas ekonomi kreatif masyarakat (Nurlena et al., 2021). Kabupaten Mojokerto sebagai salah satu daerah penyangga destinasi wisata Jawa Timur memiliki potensi besar dalam pengembangan desa wisata, terutama di wilayah Kecamatan Trawas yang dikenal dengan panorama pegunungan, suasana alam yang sejuk, serta budaya masyarakat yang khas. Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu desa yang telah mengalami perkembangan yang signifikan. Setelah dinobatkan sebagai Desa Wisata oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto pada tahun 2019, desa ini semakin dikenal setelah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memberikan penghargaan Indonesian Tourism Village Award (ADWI) 2021. Daya tarik di Ketapanrame meliputi agrowisata, wisata edukasi berbasis alam, objek wisata Air Terjun Dlundung, dan acara budaya lokal. Selain itu, keberhasilan desa ini tidak lepas dari peran BUMDes Ketapanrame yang berfungsi sebagai pengelola utama aset wisata, dengan dukungan masyarakat setempat (Maharani & Asmorowati, 2024; Rahayu & Tatak Setiadi, 2025).

Meskipun demikian, di balik pencapaian tersebut, pengembangan Desa Wisata Ketapanrame masih menghadapi berbagai persoalan yang menunjukkan adanya tantangan dalam implementasi kebijakan pemerintah daerah. Salah satu masalah yang cukup menonjol adalah ketergantungan terhadap program dan bantuan pemerintah. Meskipun desa wisata ini sudah mendapatkan dukungan berupa pembangunan infrastruktur dasar, penataan kawasan, dan bantuan promosi, namun kenyataannya implementasi kebijakan belum sepenuhnya optimal. Aksesibilitas menuju Air Terjun Dlundung misalnya, masih dinilai kurang memadai, terutama bagi wisatawan mancanegara yang mengharapkan fasilitas dengan standar yang lebih tinggi. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan pemerintah daerah yang mendorong peningkatan kunjungan wisata dengan realisasi di lapangan. Selain itu, kapasitas sumber daya manusia (SDM) di Desa Ketapanrame juga masih terbatas. Pemerintah daerah memang telah melaksanakan beberapa pelatihan pariwisata dan hospitality, namun tidak semua masyarakat desa mampu mengikuti atau menerapkan hasil pelatihan tersebut. Masih ditemukan pelaku usaha wisata yang belum menerapkan standar pelayanan optimal, baik dalam pengelolaan homestay, produk UMKM, maupun jasa wisata. Rendahnya kualitas SDM ini berdampak pada pengalaman wisatawan yang pada akhirnya memengaruhi citra desa wisata di mata pengunjung (Khofiya & Awalia, 2025).

Masalah lain yang dihadapi adalah ketidakefektifan strategi pemasaran, terutama di ranah digital. Pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata telah menerapkan serangkaian program promosi berbasis teknologi, namun promosi Desa Wisata Ketapanrame masih bergantung pada penggunaan media sosial komunitas dan jaringan lokal. Ketidakhadiran strategi pemasaran terintegrasi membuat desa ini kurang kompetitif dibandingkan dengan objek wisata lain di kawasan Trawas dan Pacet yang lebih berkembang. Kondisi ini berarti bahwa strategi promosi yang diterapkan belum sepenuhnya mampu meningkatkan daya tarik wisata desa. Selain itu, kondisi partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata juga belum merata. Meskipun terdapat beberapa warga yang aktif dengan melalui BUMDes, ada beberapa masyarakat yang masih pasif atau bahkan tidak percaya terhadap manfaat keberadaan desa wisata. Bagian keuntungan pun beberapa warga mengeluhkan seolah belum adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Seperti itu menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah daerah akan meningkatkan partisipasi masyarakat belum sepenuhnya memunculkan pemerataan dan inklusivitas. Di sisi lain, keberlanjutan lingkungan juga menjadi tantangan. Kegiatan pariwisata yang berkembang seringkali menghadapi masalah penumpukan sampah, kerusakan ekosistem, dan polusi. Di Desa Ketapanrame, peningkatan kunjungan wisatawan ke Air Terjun Dlundung justru menimbulkan masalah berupa penumpukan sampah plastik dan keterbatasan kapasitas parkir. Meskipun pemerintah daerah telah mengeluarkan regulasi terkait tata kelola lingkungan, namun implementasinya masih

lemah di tingkat lapangan sehingga menimbulkan risiko terhadap keberlanjutan sumber daya alam.

Fenomena-fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan pemerintah daerah dalam mengembangkan desa wisata dengan hasil nyata yang dicapai. Implementasi kebijakan yang belum konsisten dapat berdampak pada efektivitas pengembangan Desa Wisata Ketapanrame, baik dari sisi peningkatan jumlah wisatawan, kontribusi terhadap ekonomi masyarakat, keberlanjutan lingkungan, maupun citra destinasi. Oleh karena itu, penelitian dengan judul “Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Efektivitas Pengembangan Desa Wisata Ketapanrame Trawas Kabupaten Mojokerto” menjadi penting untuk dilakukan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei (Dzulfikri & Kusworo, 2017; Mursyidah et al., 2023). Penelitian dilaksanakan di Desa Ketapanrame, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Adapun definisi operasional dan indikator variabel dalam penelitian ini adalah ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah (X)

Implementasi kebijakan pemerintah daerah merupakan proses pelaksanaan keputusan atau program yang telah ditetapkan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan tertentu, terutama dalam konteks pengembangan sektor pariwisata desa. Implementasi kebijakan pemerintah daerah diukur dengan indikator, komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi (Yusuf et al., 2025).

2. Efektivitas Pengembangan Desa Wisata (Y)

Efektivitas pengembangan desa wisata adalah tingkat keberhasilan pelaksanaan program atau kegiatan pengembangan wisata desa dalam mencapai tujuan peningkatan daya tarik wisata, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan ekonomi lokal. Efektivitas pengembangan desa wisata diukur dengan indikator ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program (Yusuf et al., 2025).

Populasi dalam penelitian ini mencakup pegawai Dinas Pariwisata, perangkat desa, pelaku usaha, serta wisatawan, dengan metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Total responden yang terlibat berjumlah 130 orang. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan analisis regresi linier sederhana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian dilakukan di Desa Ketapanrame, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto dengan sampel yang diperoleh sebanyak 56% responden merupakan masyarakat/pelaku usaha lokal, 22% perangkat desa, 12% pegawai Dinas Pariwisata, dan 10% wisatawan. Berikut hasil pengujian validitas dan reliabilitas instrumen dalam penelitian ini:

Tabel 1. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Variabel	Indikator	R hitung	Cronbach's Alpha
Implementasi Kebijakan	Komunikasi	0.502	0.872
	Sumber Daya	0.712	
	Disposisi	0.499	
	Struktur Birokrasi	0.720	
Efektivitas Pengembangan Desa	Ketepatan Sasaran Program	0.831	0.905
	Sosialisasi Program	0.781	
	Tujuan Program	0.812	
	Pemantauan Program	0.710	

Berdasarkan pengujian di atas, diketahui bahwa untuk variabel implementasi kebijakan memperoleh nilai r hitung terendah 0,499 dan nilai tertinggi sebesar 0,720. Sedangkan variabel efektivitas pengembangan desa wisata memperoleh nilai r hitung terendah 0,710 dan nilai r hitung tertinggi sebesar 0,831. Berdasarkan pendapat Santoso (2018), nilai r hitung $> 0,3$ dinyatakan valid. Adapun uji reliabilitas variabel implementasi memperoleh nilai cronbach's alpha sebesar 0,872 dan variabel efektivitas pengembangan desa wisata memperoleh nilai cronbach's alpha sebesar 0,905. Berdasarkan pendapat Santoso (2018), nilai cronbach's alpha $> 0,6$ dinyatakan reliabel. Adapun hasil statistic deskriptif dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Deskripsi Jawaban Responden

Variabel	Indikator	Jawaban Responden					Total	Mean
		STS	TS	N	S	SS		
Implementasi Kebijakan	Komunikasi	5	14	5	35	71	543	4.18
	Sumber Daya	1	25	15	41	48	500	3.85
	Disposisi	24	1	13	25	67	500	3.85
	Struktur Birokrasi	34	29	18	28	21	363	2.79
	Ketepatan							
	Sasaran Program	26	12	5	35	52	465	3.58
	Sosialisasi							
	Program	18	26	12	32	42	444	3.42
Efektivitas Pengembangan Desa	Tujuan Program	2	15	5	52	56	535	4.12
	Pemantauan Program	0	25	4	58	43	509	3.92

Sumber: Hasil Olah Peneliti (2025)

Berdasarkan hasil perhitungan, nilai rata-rata tertinggi terdapat pada indikator komunikasi sebesar 4,18 yang termasuk kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi antara pemerintah daerah, perangkat desa, dan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan desa wisata berjalan cukup efektif. Informasi mengenai program, kebijakan, dan pelaksanaan kegiatan dapat tersampaikan dengan baik kepada para pemangku kepentingan. Indikator dengan nilai terendah adalah struktur birokrasi sebesar 2,79 yang berada pada kategori rendah. Hal ini menandakan bahwa masih terdapat kendala birokratis seperti alur koordinasi yang panjang, kurangnya kejelasan pembagian tugas, dan lambatnya proses pengambilan keputusan di tingkat daerah maupun desa. Struktur birokrasi yang belum optimal ini menjadi salah satu hambatan utama dalam implementasi kebijakan pengembangan desa wisata (Kristanti & Sukmana, 2023; Witin et al., 2024).

Untuk variabel efektivitas pengembangan desa wisata, diketahui untuk indikator tujuan program memiliki nilai tertinggi sebesar 4,12 dan termasuk kategori tinggi, menunjukkan bahwa sebagian besar responden menilai tujuan dari program pengembangan desa wisata sudah jelas dan terarah, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat potensi lokal. Sementara itu, dua indikator lainnya yaitu ketepatan sasaran program dengan nilai rata-rata sebesar 3,58 dan sosialisasi program dengan nilai rata-rata sebesar 3,42 masih berada pada kategori sedang. Hal ini mengindikasikan bahwa masih perlu peningkatan dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat agar program benar-benar tepat sasaran, serta perlu memperkuat kegiatan sosialisasi dan promosi agar masyarakat lebih memahami manfaat dan peran mereka dalam pengembangan desa wisata (Allyreza & Winangsih, 2023; Noviasari et al., 2025). Berikut hasil uji normalitas data dalam penelitian ini.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		130
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.99322551
Most Extreme Differences	Absolute	.073
	Positive	.063
	Negative	-.073
Test Statistic		.073
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber: Hasil Olah Peneliti (2024)

Berdasarkan Tabel 3, diketahui nilai signifikansi dari uji kolmogorov-smirnov sebesar $0,200 > 0,05$. Artinya data dalam penelitian ini terdistribusi normal dan dianalisis lebih lanjut. Adapun hasil analisis data adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Analisis Regresi dan Pengujian Hipotesis

Variabel	Koefisien (B)	t- hitung	Sig. (p)	R = 0,652	R ² = 0,425
Konstanta		12.315			
Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah (X)	0.684	9.762	0.000	0.652	0.425

Sumber: Hasil Olah Peneliti (2025)

Berdasarkan hasil analisis regresi, diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,684 dengan nilai signifikansi (p) = $0,000 < 0,05$, yang berarti bahwa implementasi kebijakan pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengembangan Desa Wisata Ketapanrame Trawas. Nilai R^2 sebesar 0,425 mengindikasikan bahwa 42 persen variasi dalam efektivitas pengembangan desa wisata dapat dijelaskan oleh variabel implementasi kebijakan pemerintah daerah. Sementara itu, sisanya sebesar 57,5 persen dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini, seperti tingkat partisipasi masyarakat, dukungan sektor swasta, kegiatan promosi, serta ketersediaan infrastruktur.

Temuan studi menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah daerah memiliki dampak yang signifikan terhadap efektivitas pengembangan Desa Wisata Ketapanrame Trawas. Hal ini menunjukkan bahwa kesuksesan pengembangan kawasan wisata tidak hanya bergantung pada potensi lahan, ekonomi, dan partisipasi masyarakat, tetapi juga sangat bergantung pada beberapa kebijakan efektif yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Implementasi kebijakan bukanlah sekadar penerapan undang-undang atau program, melainkan mencakup seluruh tahapan mulai dari penyampaian kebijakan, ketersediaan sumber daya sehari-hari, disposisi pelaksanaan, hingga efektivitas struktur birokrasi. Ketika seluruh komponen tersebut berjalan baik, maka program pengembangan desa wisata dapat mencapai tujuan secara optimal, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan jumlah wisatawan, serta keberlanjutan kegiatan ekonomi lokal (Areros et al., 2022; Dangi & Jamal, 2016).

Berdasarkan dari deskripsi jawaban responden, diketahui bahwa indikator komunikasi memperoleh nilai tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi antara pemerintah daerah, perangkat desa, dan masyarakat berjalan efektif. Informasi kebijakan dapat tersampaikan dengan baik sehingga pelaksana di tingkat desa memahami arah dan tujuan program pengembangan wisata. Namun demikian, indikator struktur birokrasi memperoleh skor terendah, menunjukkan masih adanya hambatan administratif dalam pelaksanaan kebijakan. Hal ini sejalan dengan teori Edward III (1980) yang menyatakan bahwa kegagalan implementasi sering kali disebabkan oleh lemahnya struktur birokrasi dan koordinasi antar aktor (Baldo, 2022; Kamaruddin & Ikhwan, 2025; Kanon, 2024). Dengan demikian, meskipun arah kebijakan sudah jelas, proses pelaksanaannya masih dapat terhambat oleh panjangnya rantai birokrasi dan ketidaktepatan koordinasi antarinstansi. Secara teoritis, hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa implementasi kebijakan publik harus dilihat sebagai proses

interaksi dinamis antara berbagai elemen pelaksana. Dalam kasus Ketapanrame, keberhasilan kebijakan pengembangan desa wisata tidak hanya berasal dari keputusan pemerintah daerah, tetapi juga dari dukungan sumber daya lokal dan komitmen pelaksana di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator target program memperoleh nilai rata-rata tertinggi, yang menandakan bahwa mayoritas responden menilai tujuan pengembangan Desa Wisata Ketapanrame sudah jelas dan terfokus. Pemerintah daerah bersama aparatur desa telah menetapkan target yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan potensi wisata alam dan budaya. Temuan ini mengindikasikan bahwa tingkat efektivitas pengembangan Desa Wisata Ketapanrame sangat bergantung pada ketepatan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, khususnya dalam penyediaan sumber daya, koordinasi pelaksanaan, serta efektivitas komunikasi program. Ketika komunikasi efektif dan sumber daya memadai, maka masyarakat akan lebih terlibat aktif, dan pada akhirnya tujuan pengembangan desa wisata akan tercapai dengan lebih baik (Bhuiyan et al., 2023).

Terdapat pengaruh positif dan signifikan implementasi kebijakan daerah terhadap efektivitas pengembangan desa wisata Ketapanrame Trawas Kabupaten Mojokerto. Selaras dengan studi yang dilakukan Yusuf et al., (2025), yang membuktikan bahwa implementasi kebijakan daerah mampu meningkatkan efektivitas pengembangan desa wisata. Ketika kebijakan diterapkan dengan baik dan didukung oleh koordinasi antarinstansi yang solid, maka tujuan program pengembangan desa wisata akan tercapai secara optimal. Selain itu, hasil ini juga konsisten dengan temuan Raynaldi et al., (2024) yang menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kesiapan desa dalam menyediakan sumber daya manusia, finansial, dan kelembagaan yang memadai, serta adanya keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan program. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin baik pelaksanaan kebijakan daerah, maka semakin efektif pula pengembangan desa wisata, karena kebijakan tersebut menjadi penggerak utama dalam mengintegrasikan potensi lokal, memperkuat koordinasi antar aktor, dan menciptakan sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan (Dias et al., 2024).

Implikasi dari hasil penelitian adalah bahwa pemerintah daerah perlu memperkuat kapasitas implementasi kebijakan dengan memastikan alur komunikasi yang terbuka dan dua arah antara pembuat kebijakan, perangkat desa, serta masyarakat. Disisi lain, diperlukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia lokal guna melaksanakan program desa wisata secara mandiri dan berkelanjutan. Pemerintah memiliki peran dalam memperbaiki struktur birokrasi guna lebih responsif dan efisien sebagai upaya mencukung kegiatan desa wisata. Selain itu, pertisipasi masyarakat diperlukan dalam perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pengembangan desa wisata. Dengan langkah-langkah tersebut, efektivitas kebijakan daerah dalam mengembangkan desa wisata akan semakin optimal dan berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menyimpulkan menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah daerah memiliki peran signifikan pada efektivitas pengembangan desa wisata Ketapanrame Trawas Kabupaten Mojokerto. Keberhasilan dalam pengembangan desa wisata juga tergantung pada sejauh mana kebijakan pemerintah dapat diimplementasikan secara efektif. Koordinasi yang baik antara pemerintah, perangkat desa dan masyarakat mampu memperkuat kolaborasi serta meningkatkan partisipasi aktif warga dalam mendukung program pengembangan desa wisata. Namun, masih terdapat beberapa kekurangan pada aspek birokrasi dan sosialisasi program yang kurang maksimal, sehingga pelaksanaan kebijakan belum optimal. Adapun keterbatasan penelitian ini yaitu faktor yang mempengaruhi efektivitas pengembangan desa wisata masih terbatas pada implementasi kebijakan pemerintah daerah, tanpa mempertimbangkan faktor lain. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas model analisis dengan memasukkan variabel partisipasi masyarakat, strategi promosi digital, serta peran kelembagaan lokal agar hasil yang diperoleh lebih komprehensif dan aplikatif.

REFERENCES

- Allyreza, R., & Winangsih, R. (2023). Implementasi Keputusan Bupati Tentang Pembentukan Desa Wisata Di Kabupaten Serang (Studi Desa Wisata Potensi Bahari). *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 7(2), 158–172. <https://doi.org/10.56945/jkpd.v7i2.258>
- Areros, W. A., Lengkong, F. D. J., & Londa, V. Y. (2022). Implementation of Tourism Village Policy in South Minahasa Regency. *Journal of Asian Multicultural Research for Social Sciences Study*, 3(3), 64–71. <https://doi.org/10.47616/jamrss.v3i3.304>
- Baldo, J. (2022). Memory Traces in The Reign of King Edward III. *Humanities*, 11(3), 59. <https://doi.org/10.3390/h11030059>
- Bhuiyan, M. A., Zhang, Q., Xuan, W., Rahman, M. K., & Khare, V. (2023). Does Good Governance Promote Sustainable Tourism? A Systematic Review of PESTEL Analysis. *SN Business & Economics*, 3(1), 33. <https://doi.org/10.1007/s43546-022-00408-x>
- Dangi, T., & Jamal, T. (2016). An Integrated Approach to “Sustainable Community-Based Tourism.” *Sustainability*, 8(5), 475. <https://doi.org/10.3390/su8050475>
- Dias, Á., Viana, J., & Pereira, L. (2024). Barriers and Policies Affecting the Implementation of Sustainable Tourism: The Portuguese Experience. *Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events*, 1–19. <https://doi.org/10.1080/19407963.2024.2314514>
- Dzulfikri, A., & Kusworo, B. (2017). Sikap, Motivasi, dan Minat Berwirausaha Mahasiswa di Surabaya. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 5(2), 183–200. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v5i2.1310>
- Kamaruddin, K., & Ikhsan, M. (2025). Paradoxical Strategies for Winning Change in Government Bureaucracy. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 9(1), 58–72. <https://doi.org/10.24198/jmpp.v9i1.48460>
- Kanon, M. (2024). The Networked Bureaucracy: Reinventing Formalization in the Context of Collaborative Governance. *Public Management Review*, 26(10), 2921–2942. <https://doi.org/10.1080/14719037.2023.2298230>
- Khofiya, N., & Awalia, S. (2025). Strategi Pengembangan Pariwisata Dalam Meningkatkan Perekonomian Daerah Kabupaten Subang. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 17(1), 94–109. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jiapd.v17i1>
- Kristanti, W., & Sukmana, H. (2023). Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pengembangan Califour Ketapang. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMAPIP)*, 5(4), 416–429. <https://doi.org/10.24036/jmapip.v5i4.862>
- Maharani, D. N., & Asmorowati, S. (2024). Community Empowerment dalam Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Desa Ketapanrame sebagai Desa Wisata. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 10(3), 249–260. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2024.010.03.2>
- Mursyidah, L., Rodiyah, I., Agustina, I. F., Setiawan, I., & Rustianingsih, E. (2023). The Effectiveness of the Thumb Sakera Program in Pasuruan Regency. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 11(1), 57–68. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v11i1.1751>
- Noviasari, T., Djaja, D. K., & Juliswara, V. (2025). Implementasi Kebijakan Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Studi Kasus Di Desa Wisata Argo Wijil Kalurahan Gari, Kapanewon Wonosari). *Jurnal Administrasi Publik Dan Bisnis*, 7(1). <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.36917/japabis.v7i1.219>
- Nurlena, N., Taufiq, R., & Musadad, M. (2021). The Socio-Cultural Impacts of Rural Tourism Development: A Case Study of Tanjung Tourist Village in Sleman Regency. *Jurnal Kawistara*, 11(1), 62. <https://doi.org/10.22146/kawistara.62263>
- Rahayu, A. E., & Tatak Setiadi. (2025). Implementasi Integrated Marketing Communication Desa Wisata Ketapanrame Dalam Upaya Menarik Minat Berkunjung Wisatawan. *The Commercium*, 9(1), 536–549. <https://doi.org/10.26740/tc.v9i1.66134>
- Raynaldi, R., Budiarto, R., & Rahmafitria, F. (2024). Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Desa Wisata di Desa Karedok Kecamatan Jagtagede Kabupaten Sumedang. *Media Wisata*, 22(1), 145–157. <https://doi.org/10.36276/mws.v22i1.634>
- Santoso, S. (2018). *Mahir Statistik Multivariat dengan SPSS*. Elex Media Komputindo.
- Witin, R. P. G., Adiwidjaya, I., Setyawan, D., & Ghunu, A. (2024). Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Mengembangkan Dan Mengelola Pariwisata Di Desa Pujon Kidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. *JADMENT: Journal of Administration and Development*, 1(2), 58–66. <https://doi.org/10.62085/jadment.v1i2.8>
- Yusuf, F. A. M., Setiawan, A., & Yovinus, Y. (2025). Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Efektivitas Pengembangan Desa Wisata Mukapayung Di Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Prinsip : Jurnal Mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan*, 1(2). <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.36859/prinsip.v1i2.3406>

Conflict of Interest Statement: The authors declare that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright ©2025 Hendra Sukmana, Ilmi Usrotin Choiriyah, Ahmad Riyadh Umar Balahmar. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY). The use, distribution or reproduction in other forums is permitted, provided the original author(s) and the copyright owner(s) are credited and that the original publication in this journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does not comply with these terms.